

**TELAAH KUALITAS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP OPINI AUDIT, INFRASTRUKTUR
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(STUDI EMPIRIS KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI PAPUA)**

Kristianus Hiktaop¹, Agus Nisfur Romdioni¹, dan Asrudi²

¹Jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus Merauke

² Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musamus Merauke
Hiktaop_akuntansi@unmus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh kualitas kinerja keuangan terhadap opini audit, infrastruktur daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan *structural equation modeling* berbasis varians. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap opini audit dan infrastruktur daerah, serta berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Opini audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap infrastruktur daerah dan opini audit berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara pengaruh mediasi opini audit menjadi mediator parsial untuk hubungan antara kinerja keuangan dengan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan infrastruktur menjadi mediator penuh untuk hubungan antara opini audit dengan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Opini Audit, Infrastruktur, dan Kesejahteraan masyarakat

Pendahuluan

Perubahan paradigma manajemen pembangunan pemerintah yang cenderung sentralisasi menjadi desentralisasi memberikan kesempatan yang luas untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan transparansi, menegakkan akuntabilitas publik, mendorong terciptanya pengelolaan keuangan ekonomis, efektif, dan efisien, serta memberikan ruang kepada semua stakeholder di daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan memanfaatkan segala sumber daya. Kebijakan desentralisasi juga membuka ruang untuk menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih dekat dan sesuai dengan preferensi masyarakat setempat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Otonomi daerah di Indonesia bertujuan menyelenggarakan pemebangunan yang lebih dekat dan sesuai dengan prefrensi masyarakat akar rumput sehingga dapat mengangkat drjatnya. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia salah satunya dipicu oleh semakin melebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, setiap paket kebijakan yang lahir dalam kerangka implementasi otonomi daerah merupakan suatu instrument yang dapat digunakan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif. Menurut (Putry & Badrudin, 2017) misi yang terkandung di dalam sistem otonomi daerah adalah menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya, meningkatkan kualitas layanan umum, dan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Terlaksananya pelimpahan kewenangan yang didukung dengan desentralisasi fiskal yang diwujudkan dalam bentuk transfer keuangan ke Daerah bertujuan untuk menyelenggarakan pembangunan yang

berkualitas. Transfer keuangan ke daerah dapat mendukung terlaksananya pembangunan di daerah. Oleh karenanya, pengelolaan transfer keuangan menjadi aspek yang vital dalam perencanaan dan pelaksanaa berbagai kebijakan dan program pembangunan. Pengelolaan keuangan tersebut semestinya mengedepankan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Transfer dana ke daerah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan di daerah. Transfer ke daerah diperuntuhkan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi pemerintahan dan pembangunan serta merupakan wujud nyata pemerintah untuk melakukan reformasi pembangunan.

Penilaian terhadap pengelolaan keuangan yang telah ditranfer ke daerah diperlukan guna menilai keawajaran pengelolaan, serta mencermati dengan seksama dampak yang ditimbulkan terhadap pembangunan. Sejak reformasi digulirkan, telah menciptakan kesempatan bagi semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi sebagai subyek maupaun objek pembangunan. Meskipun begitu, masalah-masalah mendasar tidak mengalami perubahan yang signifikan bagi kabupaten dan kota di provinsi Papua. Pengelolaan keuangan terutama dari aspek penatausahaan masih belum memenuhi ketentuan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Opini audit merupakan suatu cermin kualitas laporan keuangan. Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan menunjukkan bahwa selama periode penelitian, opini audit untuk kabupaten dan kota se provinis papua mengalami peningkatan yang signifikan dari status Tidak Memberikan Pendapat menjadi Wajar Dengan Pengecualian. Namun masih dominan pada status Tidak Memberikan pendapat. Selama 5 tahun periode penelitian secara agregat 49% persen kabupaten masih mendapatkan opini audit “tidak

Memberikan Pendapat”. Kabupaten yang telah mencapai opini audit kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni 33%. Sementara pemda yang telah mencapai kualitas audit WTP baru mencapai 16%, dan sisahnya adalah Tidak Wajar (TW). Trend opini audit tersebut, diharapkan memberikan efek positif terhadap pelaksanaan pembangunan riil di setiap kabupaten dan kota.

Permasalahan lain yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah adalah kurang tersedianya kualitas maupun kuantitas infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat membantu mempercepat proses pembangunan, mendorong mobilisasi barang, manusia dan jasa serta membangun konektivitas antar kabupaten. Infrastruktur memiliki peran penting untuk kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah selalu memberikan perhatian melalui proses penganggaran. Menurut (BPS, 2020) Dana Alokasi Umum merupakan instrument transfer yang dimaksudkan untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antar daerah sekaligus pemeratakan kemampuan keuangan antar daerah. Indeks kemahalan konstruksi menjadi komponen yang penting di dalam perumusan dana Alokasi umum disamping jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, luas wilayah, dan PDRB perkapita.

Indeks kemahalan konstruksi digunakan sebagai proksi untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut (BPS, 2020). Indeks kemahalan konstruksi antar kabupaten dan kota provinsi Papua masih tinggi. Tahun 2016 misalnya kota acuan adalah Kota Surabaya dengan IKK 100, maka secara Nasional IKK tertinggi adalah kabupaten Pucak dengan IKK 454,68 dan 28 Kabupaten lain masih tinggi yakni lebih dari acuan. Hal ini wajar karena hampir semua besar kabupaten secara geografis sangat sulit dijangkau. Permasalahan utama yang dihadapi oleh kabupaten dan kota di provinsi Papua antara lain ketersediaan serta akses terhadap kualitas dan kuantitas infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan rendahnya distribusi dan alokasi fiskal daerah.

Pengelolaan keuangan yang optimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan keuangan yang optimal selalu mempertimbangkan outcome atau dampak yang tercipta dimasa yang akan datang dari pada hanya output yang hanya bersifat jangka pendek. Menerapkan tatakelola baik dalam mengelola kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal daerah yang berimbang, tersedianya kualitas infrastruktur yang memadai, dan peningkatan kualitas manusia yang berkarakter, inovatif dan produktif dan mandiri merupakan outcome yang hendak diwujudkan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kualitas pengelolaan keuangan serta dampaknya terhadap opini audit, infrastruktur dan, kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN LITERATUR

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategik suatu organisasi, Bastian dalam (Hasthoro & Sunardi, 2016). Kinerja keuangan adalah menggunakan indikator-indikator keuangan untuk menilai capaian keuangan dalam satu periode tertentu. Menurut (Hasthoro & Sunardi, 2016) analisis kinerja keuangan adalah penilaian kinerja keuangan di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Pengelolaan keuangan pemerintahan saat ini dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pada manajemen pemerintah merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh birokrasi yang diberi amanah mengelola keuangan negara. Akuntabilitas dimaksudkan apakah dana yang diamanatkan digunakan dengan cara yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku (Musahadah & Rustan, 2018).

Opini Audit

Opini audit adalah suatu pendapat yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan norma atau juga aturan pemeriksaan akuntansi yang diikuti dengan pendapat kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, Tobing dalam (Putry & Badrudin, 2017). Laporan keuangan yang disajikan oleh setiap entitas pemerintah dapat dimanfaatkan oleh para stakeholder untuk berbagai kepentingan. Para stakeholder pemerintah berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Para pengguna tersebut mengharapkan informasi ekonomik yang disediakan oleh pemerintah harus terbebas dari berbagai kesalahan dan kecurangan yang cenderung merugikan mereka. Untuk menjamin kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh suatu tingkat pemerintah perlu dinilai akuntan public sebagai akuntan profesional yang independen. Penilaian kualitas laporan keuangan tersebut dapat diwujudkan melalui suatu perikatan audit antara entitas pemerintahan dengan badan periksa keuangan.

Auditor memberikan penilaian berdasarkan informasi keuangan yang disajikan oleh kliennya. Oleh kerennanya, klien dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Semakin tinggi kualitas laporan keuangan akan mendapatkan opini audit pada level wajar tanpa pengecualian. Entitas yang mendapatkan hasil audit wajar tanpa pengecualian mengindikasikan kinerja keuangan yang berkualitas. Opini audit sangat bergantung kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh entitas.

Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur wilayah berperan penting dan menjadi kebutuhan utama dalam rangka melakukan akselerasi pembangunan. Infrastruktur yang memadai dapat mendorong percepatan pembangunan pada berbagai lini antara lain terciptanya pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, moblisasi barang, manusia dan jasa, menekan biaya pembangunan dan biaya sosial bagi pemerintah. Infrastruktur yang memadai dapat membantu meningkatkan pelayanan publik yang optimal. Menurut Kodoatie dalam (Fajri, 2017) sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk sistem fungsi sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan dan Lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat, Friedlander dalam (Fajri, 2017)

Tujuan akhir yang hendak diwujudkan dari suatu proses pembangunan yakni peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan konstruk reflektif. Konstruk reflektif artinya konstruk yang tidak bisa diukur secara langsung sehingga diperlukan manifest. Secara konseptual, kesejahteraan masyarakat identik dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi, pendidikan dan drajat kesehatan masyarakat. Ketiga aspek tersebut merupakan unsur utama mengukur indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan angka indeks komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup suatu masyarakat dengan melibatkan tiga konstruk ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Semakin baik nilai indeks pembangunan manusia, menunjukkan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, dan sebaliknya. Kesejahteraan masyarakat dapat terbentuk melalui akumulasi tiga konstruk tersebut secara simultan.

Pengelolaan keuangan daerah, opini audit, infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat merupakan konstruk yang memiliki hubungan kausalitas dan saling memberi dampak. Kapasitas fiskal daerah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan fiskal. Kebutuhan fiskal merupakan seluruh beban yang dapat dibiayai oleh anggaran pemerintah. Masalah-masalah pembangunan seperti rendahnya kualitas infrastuktur, kemiskinan, gizi buruk, kualitas pendidikan yang rendah, kurangnya akses pelayanan kesehatan

masyarakat merupakan sasaran penerapan anggaran publik. oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan daerah oleh pemerintah dapat dibebankan dan dibiaya melalui proses anggaran pendapatan dan belanja daerah. tujuan biaya pembangunan infrastuktur dan perlindungan sosial adalah membantu masyarakat yang rentan terhadap pembangunan sehingga mereka bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Oleh karenanya, dari aspek kemanfaatan, pelaksanaan anggaran yang inklusif menjadi sangat penting.

Berdasarkan telaah hubungan kausalitas antara variabel dan teori yang dikembangkan, hipotesis yang diuji dalam penelitian ini antara lain:

- H₁: Kinerja Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Infrastruktur
- H₂: Kinerja Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Opini audit
- H₃: Kinerja Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat
- H₄: Opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat
- H₅: Opini Audit berpengaruh positif terhadap Infrastruktur daerah
- H₆: Opini audit menjadi variabel mediator antara kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat
- H₇: Infrastruktur menjadi variabel mediator antara kinerja keuangan dengan kesejahteraan masyarakat
- H₈: Infrastruktur menjadi variabel mediator antara opini audit dengan kesejahteraan masyarakat

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan kategori paradigma kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling. Data diperoleh dari web. Kemenkeu.go.id, Papua. BPS.go.id, dan BPK.go.id. Pengujian model penelitian hanya dilakukan pada Inner model dengan linear algorithm. Variabel kinerja keuangan diukur dengan indikator Value for Money yakni Efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Infrastruktur daerah di proxikan dengan indeks kemahalan konstruksi. Opini audit dapat diukur dengan Tidak Menyatakan Pendapatan di beri skor 1, Tidak wajar diberi skor 2, Wajar dengan pengecualian 3, Wajar Tanpa Pengecualian-dengan Paragraf penjelas diberik skor, 4 dan Wajar Tanpa Pengecualian diberi skor 5. Kesejahteraan masyarakat diproxikan dengan indeks pembangunan manusia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Evaluasi Modal

Evaluasi Inner modal digunakan untuk menilai fit model. Evaluasi model dilakukan untuk menilai layak tidaknya penggunaan model dihasilkan dalam penelitian ini.

Nilai adjusted R-squared untuk variabel opini audit dan infrastuktur daerah masuk pada kategori lemah.

Sedangkan variabel kesejahteraan masyarakat masuk pada kategori moderat. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa model penelitian terbebas dari masalah multikolinearitas dan model layak digunakan untuk melakukan estimasi. Nilai Q-squared digunakan untuk menilai apakah model mempunyai predictive relevance yang baik. Menurut (Ghozali, 2012) nilai Q-squared > 0, menunjukkan bahwa model memiliki predictive relevance, dan sebaliknya. Model penelitian ini mempunyai *predictive relevance* karena nilai Q^2 lebih besar dari 0. Dalam model terlihat bahwa hubungan antara kinerja keuangan daerah dengan variabel endogen opini audit dan infrastruktur daerah mempunyai predictive relevance pada kategori lemah. Sedangkan hubungan antara KKD dengan kesejahteraan masyarakat mempunyai predictive relevance pada kategori kuat. Dengan demikian, disimpulkan bahwa model structural layak diinterpretasikan.

Pembahasan

Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Opini Audit

Hasil uji varian antara kualitas kinerja keuangan dan opini audit menunjukkan pengaruh yang positif dan tidak signifikan lihat table 1. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kinerja keuangan daerah yang diprosi dengan *Value For money* tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit. Dengan demikian H_1 ditolak. Hasil regresi ini bertolak belakang dengan hasil penelitian (Putry & Badrudin, 2017) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit. Perbedaan hasil penelitian ini bisa saja terjadi karena objek penelitian dan indikator keuangan yang digunakan. Di lain pihak hasil uji hipotesis ini mendukung realitas pengelolaan keuangan kabupaten dan kota di provinsi Papua. Penilaian kualitas kinerja keuangan daerah penelitian ini menggunakan manifest *value for Money*. Konsep tersebut menggunakan tiga indikator yakni ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Pemeriksaan laporan keuangan suatu entitas perintah oleh auditor independen dapat memacu entitas tersebut meningkatkan kinerja keuangan, mengalokasikan sumber daya sesuai diperuntuhkan, memperbaiki dan meningkatkan perspektif dan keyakinan publik atas kredibilitas pengelolaan kapasitas fiskal daerah maupun kebutuhan fiskal daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan kabupaten dan kota di provinsi Papua belum maksimal.

Tabel 2: Pengaruh langsung

Konstruk	Koefisien	P-value
Opini Audit	0,061	0,247
Infrastruktur Daerah	0,048	0,326
Kesejahteraan Masyarakat	-0,025	0,347

Sumber data: Data diolah

Opini audit sangat bergantung pada pengelolaan keuangan secara keseluruhan, mulai

dari kepatuhan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah, penilaian dan pengakuan setiap transaksi, penerapan basis dan asumsi-asumsi akuntansi, penatausahaan keuangan, (penyelenggaraan sistem akuntansi), dan sistem pelaporan keuangan realisasian maupun laporan keuangan pemerintah. Semakin baik opini audit, artinya kinerja keuangan setiap entitas berkualitas, dan sebaliknya. Pengaruh variasi indikator keuangan terhadap opini audit menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan artinya kualitas kinerja keuangan daerah masih rendah.

Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Infrastruktur

Analisis jalur yang kedua menguji pengaruh kualitas kinerja keuangan terhadap infrastruktur daerah. Kedua konstruk tersebut saling mempengaruhi. Semakin besar kapasitas fiskal dapat menjamin tersedia kualitas infrastruktur yang memadai. Sebaliknya kuantitas maupun kualitas infrastruktur yang memadai dapat mendukung peningkatan trend pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang dapat memberikan efek ganda seluruh aspek pembangunan tanpa terkecuali peningkatan kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian menunjukkan kualitas kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap infrastruktur daerah. Jalur KKD- ID diperoleh nilai beta 0,048 dengan tingkat signifikan 0,346 > 0,05. Dengan demikian H_2 ditolak artinya kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap infrastruktur daerah. Hasil penelitian ini seiring dengan temuan

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa selama periode penelitian pengelolaan keuangan daerah belum memihak pada ketersediaan infrastruktur yang memadai. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas infrastruktur suatu wilayah yakni biaya konstruksi. Rata-rata biaya konstruksi kabupaten kota provinsi selama tahun 2012-2017 berturut turut, 254,01, 257,97, 257,79, 250,24, 243,61, dan 245,97. Indeks ini berada diatas rata-rata acuan. Gejala pembangunan ini mempertegas bahwa setiap level pemerintah dapat mengelola kapasitas fiskal secara baik dan dapat melaksanakan fungsi alokasi secara berimbang antara kebutuhan fiskal operasional dan kebutuhan modal atau belanja pembangunan. Alasan lain yang masuk akal mengapa kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap infrastruktur adalah setiap pemerintah daerah masih mengalami kendala dalam kapasitas fiskal yang masih terbatas. Keterbatasan kapasitas fiskal ini menjadi tantangan bagi setiap pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan lembaga Legislatif perlu bekerja sama dan menjalankan fungsinya masing-masing secara efektif agar ketersediaan dana yang terbatas tersebut dapat terserap dengan baik pada sektor-sektor produktif, seperti belanja infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi vital karena kualitas infrastruktur merupakan barometer kemajuan suatu wilayah. Infrastruktur menjadi kebutuhan utama karena

dapat menjamin kelancaran dan mobilisasi barang, manusia, serta jasa dan membentuk konektivitas antarwilayah.

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari nilai Beta, $-0,025$ dengan tingkatkan signifikan $0,247 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis H_3 yang menyatakan kualitas kinerja keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat ditolak. Hal ini menandakan bahwa kualitas kinerja keuangan yang diproksi dengan Value For Money tidak berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. nilai koefisien $-0,025$ artinya kinerja keuangan berkuarng 2,5 persen akan menurunkan kesejahteraan masyarakat berkurang sebanyak 2,5 persen. Hasil penelitian ini seiring dengan temuan (Khairudin.et.al., 2019) yang menemukan bahwa efiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh Negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hubungan antara konstruk kinerja keuangan dan Kesejahteraan masyarakat tidak searah, artinya pengelolaan keuangan cenderung menghabiskan anggaran untuk memenuhi ketentuan administrasi bukan berfokus pada dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang akan datang. Oleh karenanya, pemerintah daerah harus mengubah orientasi pembangunan berbasis output menjadi outcome. Karena pembangunan yang berbasis output seringkali mendorong masyarakat cenderung tidak produktif dari pada pembangunan yang berbasis outcome. Perubahan pola pembangunan tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah sosial yang sangat kompleks di setiap kabupaten dan kota di provinsi Papua.

Pengaruh Opini Audit terhadap kesejahteraan masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Nilai koefisien, $0,104$ dengan tingkat probabilitas $0,034 > 0,05$, dengan H_4 diterima, artinya opini audit berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung (Musahadah & Rustan, 2018) yang menyatakan bahwa secara factual terdapat beberapa pemerintah daerah yang sudah mendapatkan WTP tetapi justru menunjukkan permasalahan kemiskinan, pengangguran, serta gini ratio tinggi yang timpang.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis penelitian, namun kondisi faktual menunjukkan banyak masalah sosial yang belum tangani secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengelola keuangan secara optimal. Status opini yang diberikan kepada kabupaten dan kota di provinsi Papua seharusnya mendukung dengan kondisi faktual di setiap

kabupaten. Wacana BKP mengenai audit kinerja kesejahteraan masyarakat perlu diimplementasikan di wilayah Papua. Penelitian ini mendukung pendapat (Musahadah & Rustan, 2018) pemeriksaan BPK selama ini lebih cenderung masih melihat ke kelengkapan administrasi akuntabilitas, belum masuk pada upaya mengevaluasi keberhasilan perencanaan dan anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah bagi kesejahteraan masyarakat, maka BPK perlu memasukan audit kesejahteraan masyarakat dalam proses pemeriksaan keuangan pemerintah daerah mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan konkrit yang mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh opini audit terhadap Infrastruktur daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Opini audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap infrastruktur daerah. Dengan demikian H_5 ditolak. Hasil ini menunjukkan apapun opini audit belum berkontribusi positif peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur kabupaten dan kota di provinsi Papua. Dengan kata lain, opini audit sebagai wujud kualitas keuangan daerah tidak mendukung infrastruktur wilayah kabupaten dan kota di provinsi Papua. Hal ini wajar karena selama periode penelitian, opini audit rata-rata ada pada kategori Tidak Memberikan Pendapat, sebanya 49 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memperbaiki kualitas pengelolaan keuangannya. Opini audit pada kategori Tidak Memberikan Pendapat cenderung menurun tetapi masih di atas 40 persen. Sedangkan opini audit WDP-dengan pargarap penjas dan WTP cenderung mengalami peningkatan. Meskipun telah mengalami perubahan kualitas pengelolaan keuangan tetapi kontribusi real terhadap peningkatan kualitas pembangunan masih jauh dari harapan publik.

Kecendecrungan peningkatan opini audit tersebut menggambarkan bahwa secara keseluruhan telah terjadi perbaikan pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di povinsi papua. Namun, dari aspek sistem pengendalian internal belum memadai. Hasil pemeriksaan BPK atas sitem pengendalian internal pemerintah kabupaten dan kota provinsi Papua menunjukkan bahan pengelolaan keuangan tidak memadai karena penatausahaan kas setiap entitas belum memadai, pennatausahaan aset tetap tidak tertib, dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual belum memadai. Kelemahan pengelolaan keuangan tersebut ternyata tidak berdampak positif terhadap infrastruktur daerah. Pemerintah daerah dapat menindaklanjuti temuan-temuan BKP tersebut dan memperbaiki kelemahan-kelemahan guna menciptakan pengelolaan keuangan kredibel, transparan dan akuntabel sehingga memberikan dampak yang inklusif yang berkelanjutan.

Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh tidak langsung dapat nilai dengan menggunakan effect sizes coefficient dan total indirect effects. effect sizes coefficient lihat pada tabel 3 dan tabel4.

Tabel 3. standar error path Coefficient

	KKD	OP	ID
KKD			
OP	0,088		
ID	0,12	0,06	
KESMAS	0,08	0,056	0,038

Tabel.4: Effec sizes path coefficients

	KKD	OA	ID
KKD			
OA	0,004		
ID	0,002	0,058	
KEMAS	0,001	0,028	0,492

Nilai effect size yang dihasilkan untuk hubungan kinerja keuangan daerah terhadap Opini audit, infrastuktur daerah dan kesejahteraan masyarakat secara bertutu-turut 0,004, 0,002 dan 0,001. Semua nilai <0,02 berarti efek size masuk dalam kategori lemah. Nilai effect size untuk hubungan Opini audit terhadap infrastuktur dan kesejahteraan masyarakat > 0,02 tetapi < 0,15 sehingga efek size masuk dalam kategori kecil. Yang terakhir, *effect size* yang dihasilkan varaibel infrastuktur daerah terhadap kesejahteraan masyarakat >0,35 masuk pada kategori besar.

Efek tidak langsung dapat diamati melaui indirect dan total effect.

Tabel 5. Indirect dan Total Effect**Indirect effect for Path with 2 Segement**

	KKD	OP	ID
KKD			
OA			
ID		-0,015	
KESMAS		-0,027	0,167

P values of indirect effects for path with 2 Segements

	KKD	OP	ID
KKD			
OA			
ID		0,262	
KESMAS		0,366	<0,001

Standard error of Indirect Effects for path with 2 Segments

	KKD	OA	ID
KKD			
OA			
ID		0,023	
KESMAS		0,078	0,041

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa pengaruh tidak langsung untuk kinerja keuangan terhadap infrastuktur melalui opini audit tidak signifikan pada 0,262 > dari 0,05 dengan nilai standar error 0,023 yang artinya opini audit menjadi variabel mediator secara parsial untuk hubungan antara kinerja keuangan dengan infrastuktur daerah.

Pengaruh tidak langsung kualitas kinerja keuangan terhadap Kesejahteraan masyarakat melalui Infrastuktur dan Opini Audit

Kedudukan opini audit dan infrastuktur dalam penelitian sebagai variabel intervening. Hasil uji efek mediasi menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui opini audit dan infrastuktur daerah didapat hasil bahwa secara tidak langsung kualitas kinerja keuangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Nilai koefisien - 0,027 dengan tingkat signifikan 0,366 >0,05 dengan standar error 0,078. Dengan demikian H_5 dan H_6 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit dan kualitas infrastuktur yang diproxi dengan indeks kemahalan konstruksi secara Bersama tidak sejalan dengan pengelolaan keuangan daerah. Dalam hubungan tersebut, infrastuktur menjadi variabel moderasi parsial untuk hubungan antara kinerja keuangan kesejahteraan masyarakat. Peran yang sama berlaku untuk opini audit, opini audit juga menjadi mediator parsial anantara kinerja keuangan dengan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan peneltian (Indramawan.et.al., 2021)opini audit menjadi mediasi perasial untuk hubungan kinerja keuangan dengan indeks pembangunan manusia.

Pengelolaan keuangan yang optimal dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastuktur yang memadai dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini hendak menguji huungan kausalitas ketiga konstruk ini. Hasil penelitian diperoleh bahwa kualitas kinerja keuangan daerah yang diproxi dengan Value For money secara tidak langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap terhadap kesejahteraan masyarakat melalui infrastuktur. Dengan demikian, dalam model penelitian ini, infrastuktur berperan sebagai mediator parsial untuk hubungan kualitas kinerja keuangan dengan kesejahteraan masyarakat. Implikasi penting dari hasil regresi tersebut bahwa pemerintah daerah semestinya memberikan perhatian pada pengelolaan keuangan yang inklusif sehingga dapat menciptakan pembangunan yang cenerung inklusif pula.

Pengaruh tidak langsung kualitas kinerja keuangan terhadap infrastruktur melalui opini audit

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan muarah dari kebijakan pembangunan publik. Dengan kata lain, setiap entitas public pelayanan selalu berorientasi pada outcome. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu outcome. Hal tersebut dapat terwujud dengan asumsi pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Hasil pengujian efek tidak langsung menunjukkan bahwa pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap infrastruktur melalui opini audit didapatkan hasil pengaruh negatif dan tidak signifikan. Nilai beta - 0,015 dengan tingkat signifikan 0,262 > 0,05. Dengan demikian, H₇ yang menyatakan opini menjadi variabel moderator hubungan antara kinerja keuangan dan Infrastruktur, ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa opini audit tidak berperan sebagai variabel mediator untuk hubungan antara kinerja keuangan dengan infrastruktur. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah semestinya mengelola keuangan secara objektif dan diupayakan terserap sesuai peruntukannya (pengelolaan anggaran berbasis Outcome) bukan hanya sekedar mengejar realisasi (output) yang tercatat pada dokumen rencana kerja pemerintah dan memenuhi keperluan administratif semata.

Pengaruh tidak langsung Opini audit terhadap Kesejahteraan masyarakat melalui Infrastruktur

Opini audit mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Semakin baik opini audit yang diberikan, menunjukkan kualitas kinerja keuangan klien semakin baik. Pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan daerah. Salah satu indikator eksternal yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi kualitas kinerja keuangan adalah indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan sebagai manifestasi dari kesejahteraan masyarakat. Semakin baik indeks pembangunan manusia, mengindikasikan bahwa kualitas pengelolaan suatu daerah semakin baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit secara tidak langsung melalui infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan. Nilai koefisien 0,167 dengan tingkat signifikan 0,001 < 0,05. Dengan demikian H₈ yang menyatakan Infrastruktur berperan menjadi variabel moderator untuk hubungan antara opini audit dengan kesejahteraan masyarakat diterima. Artinya infrastruktur menjadi variabel moderator antara opini audit dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur berperan sebagai full moderator untuk hubungan antara opini audit dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran daerah semaksimal mungkin pada belanja produktif (belanja modal). Dengan memaksimalkan belanja modal, pemerintah dapat mendorong terciptanya kuantitas

maupun kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai guna mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat yang inklusif.

Kesimpulan

Berdasarkan telaah analisis path dapat disimpulkan Kinerja keuangan daerah secara langsung tidak berpengaruh terhadap Opini audit, infrastruktur daerah dan kesejahteraan masyarakat. Opini audit berpengaruh negatif terhadap infrastruktur yang diproksi dengan IKK tetapi opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diproksi indeks pembangunan manusia. Infrastruktur daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Opini audit menjadi mediator parsial untuk hubungan antara kinerja keuangan dengan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan infrastruktur menjadi mediator penuh untuk hubungan antara opini audit dengan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2020). *Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Tahun 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Fajri, L. M. (2017). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara). *Jurnal SIKAP*, 11-22.
- Ghozali, I. (2012). *Partial Least Square Kosep, Metode dan Aplikasi dengan Menggunakan Program WarpPls 4.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hasthoro, H. A., & Sunardi. (2016). Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 53-67.
- Indramawan.et.al. (2021). Pentingnya Opini Audit sebagai Pemeditasi Peningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 209-2018.
- Khairudin.et.al. (2019). Kinerja Keuangan Dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Daerah di Indonesia. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 108-112.
- Muda.et.al. (2014). Kajian Pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumater Utara.

Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 12-29.

Musahadah, & Rustan, A. (2018). Sebuah Paradoks: Opini WTP dan Kesejahteraan Masyarakat. *Borneo Administrator*, 135-149.

Putry, N. A., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Opini Audit Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JRMB*, 25-34.

Reni, L. M., & Setiawan, D. (2019). Pengaruh Variabel Kebutuhan Fiskal Terhadap Alokasi Dau Pada Daerah Yang Bercirikan Kepulauan. *Indonesian Treasury Review* , 285-303.